

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dinamika sejarah ekonomi di Indonesia pada abad ke-19 merupakan periode krusial yang menandai transisi dari sistem ekonomi tradisional menuju integrasi pasar global yang lebih kompleks. Perubahan ini dipicu oleh kebijakan kolonial yang berusaha memaksimalkan keuntungan dari sumber daya alam di Hindia Belanda melalui eksploitasi lahan secara sistematis.<sup>1</sup> Pada masa ini, wilayah pedalaman Jawa mulai mengalami pergeseran struktur sosial dan ekonomi yang signifikan akibat masuknya modal asing serta regulasi pemerintah kolonial. Masyarakat agraris yang sebelumnya fokus pada pemenuhan kebutuhan lokal dipaksa untuk beradaptasi dengan tuntutan produksi komoditas ekspor.<sup>2</sup> Fenomena tersebut menciptakan gelombang transformasi yang memengaruhi pola kepemilikan tanah, distribusi tenaga kerja, hingga gaya hidup masyarakat desa. Wanayasa sebagai salah satu wilayah penting di Priangan menjadi saksi bisu dari betapa masifnya dampak kebijakan ekonomi kolonial terhadap tatanan lokal.

Memasuki pertengahan abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan *Cultuurstelsel* yang secara drastis mengubah lanskap ekonomi di berbagai karesidenan di Jawa.<sup>3</sup> Kebijakan ini menuntut penduduk lokal untuk mengalokasikan sebagian tanah dan tenaga kerja mereka guna menanam tanaman komoditas yang laku di pasar internasional. Perubahan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek fundamental dalam relasi kuasa antara birokrasi kolonial dengan elit tradisional lokal. Di wilayah pegunungan yang subur, kebijakan ini mendapatkan momentum karena kesesuaian ekologis untuk pengembangan tanaman perkebunan tertentu. Wanayasa dengan karakteristik geografisnya yang unik menjadi lokasi strategis dalam skema besar eksploitasi

---

<sup>1</sup> Abdul Halim, "Sejarah: Wanayasa Pernah Jadi Pemukiman Buruh Tani Dari Cina Makau," 03 Feb, 17:00 WIB, 2022, <https://jabar.idntimes.com/news/jawa-barat/sejarah-wanayasa-pernah-jadi-pemukiman-buruh-tani-dari-cina-makau-00-c2lvs-3179k>.

<sup>2</sup> Marc Poncelet, "Colonial Ideology, Colonial Sciences and Colonial Sociology in Belgium," *American Sociologist* 51, no. 2 (2020): 148–71, <https://doi.org/10.1007/s12108-020-09455-z>.

<sup>3</sup> Wulan Sondarika, "Dampak Cultuurstelsel (Tanam Paksa) Bagi Masyarakat Indonesia Dari Tahun 1830-1870," *Jurnal Artefak* 3 (2015): 59.

ekonomi kolonial di wilayah Jawa Barat.<sup>4</sup> Proses integrasi ekonomi ini menjadi titik awal bagi perubahan struktur ekonomi masyarakat yang semula bersifat subsisten menjadi ekonomi berbasis komoditas ekspor.

Eksplorasi ekonomi di wilayah Priangan, termasuk Wanayasa, sangat identik dengan pengembangan komoditas utama seperti kopi dan teh yang menjadi primadona di pasar Eropa. Kopi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kolonial melalui sistem *Preangerstelsel* sebelum akhirnya bertransformasi menjadi bagian dari kebijakan yang lebih luas.<sup>5</sup> Penanaman kopi di lereng-lereng gunung Wanayasa membawa dampak pada mobilisasi massa dalam skala besar untuk pembukaan lahan dan perawatan tanaman. Selain kopi, tanaman teh juga mulai diperkenalkan secara luas sebagai komoditas pendamping yang menjanjikan keuntungan besar bagi kas pemerintah kolonial.<sup>6</sup> Keberadaan kebun-kebun besar ini menciptakan ekosistem baru yang memaksa masyarakat lokal berinteraksi dengan teknologi pertanian yang lebih maju pada zamannya. Transformasi ini pada akhirnya menciptakan ketergantungan ekonomi baru bagi masyarakat Wanayasa terhadap fluktuasi harga komoditas di pasar dunia.

Perluasan perkebunan kopi dan teh di Wanayasa secara langsung merombak tata ruang dan kepemilikan lahan yang selama ini diatur melalui hukum adat setempat. Tanah-tanah hutan dan lahan ulayat dialihfungsikan menjadi perkebunan monokultur yang luas di bawah kendali pemerintah kolonial atau pengusaha swasta. Proses alih fungsi lahan ini seringkali memicu ketegangan sosial karena masyarakat kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang semula menjadi tumpuan hidup mereka. Di sisi lain, pembukaan perkebunan ini juga membawa infrastruktur baru berupa jalan dan jembatan untuk mempermudah distribusi hasil panen menuju pelabuhan-pelabuhan besar.<sup>7</sup> Modernisasi infrastruktur ini menjadi pedang bermata

---

<sup>4</sup> Wayan Wisnuwardana, "Monetasi Dan Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Abad Xix I," *Kinabalu*, 2019, 1–22.

<sup>5</sup> Syarah Nurul Fazri, "Produk Dari Priangan: Teh Rakyat Di Priangan Pada Awal Abad," *Lembaran Sejarah* 18, no. 2 (2022): 158–75.

<sup>6</sup> Jan Luiten van Zanden, "Economic Growth in Java, 1815–1930: The Reconstruction of the Historical National Accounts of a Colonial Economy," *Unpublished Maddison-Project Working Paper WP 3* (2012): 1–31.

<sup>7</sup> Arifah Mahfudzoh, *Hubungan Perdagangan Cirebon Dan Sunda Kalapa XVI: Suatu Studi Sejarah Ekonomi*, 2017, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/38091>.

dua yang di satu sisi mempermudah aksesibilitas, namun di sisi lain mempercepat penetrasi kontrol kolonial hingga ke pelosok desa. Fenomena ini menunjukkan bahwa transformasi ekonomi di Wanayasa bukan sekadar perpindahan jenis tanaman, melainkan perubahan menyeluruh pada ekosistem sosial-ekonomi wilayah tersebut.

Keterlibatan masyarakat Wanayasa dalam produksi kopi dan teh membawa dampak pada perubahan pola konsumsi dan stratifikasi sosial di tingkat lokal. Munculnya kelas pekerja perkebunan dan mandor menciptakan diferensiasi pendapatan yang sebelumnya tidak terlalu mencolok dalam masyarakat agraris tradisional.<sup>8</sup> Uang tunai mulai mengalir ke desa-desa sebagai upah atau hasil penjualan komoditas, yang kemudian mengubah cara masyarakat melakukan transaksi ekonomi. Kebutuhan akan barang-barang impor dari luar wilayah mulai tumbuh seiring dengan meningkatnya interaksi masyarakat dengan jaringan perdagangan global. Namun, kesejahteraan yang dihasilkan dari komoditas ini seringkali tidak terdistribusi secara merata di antara penduduk pribumi. Ketimpangan ekonomi mulai muncul sebagai konsekuensi dari sistem yang lebih memihak pada pemilik modal dan otoritas kolonial.

Sejarah mencatat bahwa kejayaan kopi di Wanayasa sempat mengalami pasang surut akibat serangan hama dan persaingan harga di tingkat internasional pada akhir abad ke-19. Tantangan ini memaksa pemerintah kolonial dan petani lokal untuk mencari alternatif komoditas lain yang lebih tahan banting dan menguntungkan. Teh kemudian muncul sebagai solusi strategis untuk mengisi kekosongan pendapatan akibat penurunan produksi kopi di beberapa wilayah Priangan.<sup>9</sup>

Dalam rangka untuk memahami kondisi tersebut, tidak terlepas dari kebijakan ekonomi makro yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda di kenal dengan nama *Cultuurstelsel* atau Sistem Tanam Paksa yang di cetuskan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Sistem ini resmi diperkenalkan pada

---

<sup>8</sup> Lorentius Goa, "Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat," *SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral* 2, no. 2 (2017): 53–67, <https://doi.org/10.53544/sapa.v2i2.40>.

<sup>9</sup> Jan Breman, *Keuntungan Kolonial Dari Kerja Paksa; Sistem Priangan Dari Tanam Paksa Kopi Di Jawa 1720-1870* (Jakarta: YOI, 2014).

tahun 1830 sebagai pilar utama restrukturisasi keuangan negara kolonial.<sup>10</sup> Regulasi dalam sistem tersebut mengubah hak pemanfaatan tanah tradisional yang sebelumnya dikuasai oleh masyarakat desa.<sup>11</sup> Pemerintah kolonial kemudian memobilisasi tenaga kerja bumiputera dalam skala yang sangat masif dan terorganisasi. Mobilisasi ini difokuskan untuk menanam komoditas pertanian yang memiliki nilai jual tinggi di Eropa. Komoditas utama yang menjadi prioritas pemerintah kolonial antara lain adalah kopi, tebu, nila, dan teh. Sistem ekstraktif tersebut mengubah struktur agraris di wilayah pedesaan Jawa secara fundamental dan menyeluruh.<sup>12</sup> Perubahan ini menggeser sistem pertanian subsisten berbasis padi menjadi pertanian komersial yang dikontrol ketat oleh birokrasi.

Dalam konstelasi ekonomi-politik tersebut, Karesidenan Krawang memiliki posisi administratif dan ekonomi yang sangat strategis. Secara geografis, wilayah karesidenan ini meliputi bentang alam yang bervariasi dari utara hingga selatan. Wilayah utara didominasi oleh kawasan dataran rendah pantai yang difungsikan sebagai persawahan serta pelabuhan. Sementara itu, wilayah bagian selatan berupa kawasan pedalaman berbukit di sekitar kaki Gunung Burangrang. Pada awal abad ke-19, Krawang berfungsi sebagai daerah penyedia logistik utama bagi wilayah sekitarnya. Wilayah ini juga ditetapkan sebagai zona pertahanan militer bagi ibu kota kolonial di Batavia.<sup>13</sup> Dinamika politik dan ekonomi di karesidenan ini mencerminkan ambisi besar dari otoritas kolonial Barat. Mereka berusaha keras menyeimbangkan antara konsolidasi kontrol birokrasi dengan peningkatan target ekstraksi ekonomi agraria.

Struktur administratif Karesidenan Krawang pada masa itu menerapkan sistem dualisme birokrasi yang sangat tegas. Sistem pemerintahan ini memisahkan antara pejabat berbangsa Eropa dengan pejabat yang berasal dari kalangan pribumi.

---

<sup>10</sup> Ulbe Bosma, "Het Cultuurstelsel En Zijn Buitenlandse Ondernemers," *Tijdschrift Voor Sociale En Economische Geschiedenis* 2, no. 2 (2005): 3–28.

<sup>11</sup> Iswahyudi, "The Implementation of the Cultuurstelsel in Java : Cases in Afdeeling Demak and Grobogan , Central Java versus in Afdeeling Pacitan , East Java 1830-1870," 1986, 657–68.

<sup>12</sup> Jan Breman, *Keuntungan Kolonial Dari Kerja Paksa; Sistem Priangan Dari Tanam Paksa Kopi Di Jawa 1720-1870*.

<sup>13</sup> Dr. F. De Haan, *De Preanger-Regentschappen Onder Het Nederlandsch Bestuur Tot 1811, Landbouwhogeschool*, 1910.

Pejabat Eropa tergabung dalam *binnenlands bestuur*, sedangkan pejabat pribumi berada dalam kelompok *inlands bestuur*.<sup>14</sup> Melalui kerja sama formal dengan para bupati, pemerintah kolonial mulai menata ulang pembagian wilayah. Penataan ulang administratif difokuskan pada wilayah pedalaman Krawang yang sebelumnya sulit dijangkau otoritas pusat. Kendala geografis berupa hutan dan perbukitan sebelumnya menjadi penghambat utama bagi pengawasan birokrasi. Penataan ruang administratif ini sengaja dirancang untuk mempermudah mobilisasi tenaga kerja lokal secara berkala. Selain itu, kebijakan tersebut mempermudah inventarisasi lahan pertanian potensial yang menjadi prasyarat komersialisasi tanah pedalaman. Di tengah penataan ulang administratif tersebut, Distrik Wanayasa menjadi wilayah yang mengalami perubahan posisi secara signifikan. Wilayah distrik ini terletak di kawasan dataran tinggi Krawang yang memiliki iklim relatif sejuk.<sup>15</sup> Wanayasa mengalami perubahan fungsi yang cepat dari wilayah pedalaman terisolasi menjadi pusat perhatian otoritas. Karakteristik ekologis wilayah topografi ini dinilai sangat mendukung rencana pengembangan pertanian dari pemerintah pusat. Posisi geografisnya yang strategis di pedalaman juga mempermudah pengawasan mobilitas penduduk antardistrik di sekitarnya. Kondisi tersebut menjadikan distrik ini sebagai lokasi uji coba kebijakan politik dan ekonomi kolonial. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan berbagai regulasi agraria baru untuk menguji produktivitas tanah di kawasan tersebut. Keberhasilan uji coba di distrik ini nantinya akan diterapkan di wilayah pedalaman Jawa lainnya.

Peristiwa penting dalam sejarah distrik ini terjadi pada tahun 1821 melalui kebijakan bupati setempat. Bupati Krawang pada masa itu, Raden Adipati Aria Surianata, memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan kabupaten.<sup>16</sup> Ibu kota kabupaten yang semula berada di wilayah pesisir Karawang dipindahkan menuju Distrik Wanayasa. Pemindahan pusat pemerintahan ini merupakan bagian dari strategi integrasi politik wilayah pedalaman secara formal. Langkah

---

<sup>14</sup> Ani Ismarini, "Kedudukan Elit Pribumi Dalam Pemerintahan Di Jawa Barat (1925-1942)," *Patarjala* 6, no. 2 (2014): 179–92. Hal. 180

<sup>15</sup> "Sejarah Teh Di Wanayasa Purwakarta," 2024, <https://disipusda.purwakartakab.go.id/sejarah-teh-di-wanayasa-purwakarta/>.

<sup>16</sup> F. De Haan, *Priangan: De Preanger-Regentschappen Onder Het Nederlandsch Bestuur Tot 1811*, 2nd ed. (Batavia: Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1911).

administratif tersebut diambil untuk memperkuat posisi krawang karena pada saat itu sering terjadi banjir dan adanya ketidakamanan. Otoritas kolonial memberikan dukungan penuh terhadap pemindahan ini demi kelancaran pemerintahan mereka. Integrasi politik melalui pemindahan ibu kota pada tahun 1821 tersebut mengubah struktur kekuasaan lokal. Otoritas tradisional para kepala desa yang sebelumnya independen kini berada di bawah pengawasan birokrasi. Mereka diawasi secara ketat oleh Asisten Residen Krawang yang bernama G. Serriere pada periode tersebut.<sup>17</sup>

Pada tahun 1828 pemerintah kolonial memulai melakukan ekspansi ekonomi. Ekspansi ekonomi di Wanayasa diawali melalui pengenalan tanaman teh yang dipimpin oleh seorang pakar botani. Pakar botani berkebangsaan Belanda tersebut bernama Jacobus Isidorus Loudewijk Levien Jacobson yang bekerja untuk pemerintah.<sup>18</sup> Eksperimen budidaya ini dilakukan dengan menanam benih-benih teh impor secara massal di area tersebut. Lokasi penanaman difokuskan pada lahan-lahan miring di sepanjang lereng bagian bawah Gunung Burangrang. Keberhasilan adaptasi komoditas baru ini mengubah fungsi strategis Distrik Wanayasa dalam sistem karesidenan. Wilayah yang semula direncanakan sebagai pusat administrasi pemerintahan dan pertahanan bergeser menjadi kawasan industri. Perkebunan komersial berskala besar mulai dibangun untuk memenuhi permintaan pasar teh ekspor yang sedang meningkat.

Perkembangan budidaya tanaman komersial ini menimbulkan fase transformasi yang berjalan sangat cepat di Wanayasa. Dalam kurun waktu singkat, penggunaan lahan dan tata ruang wilayah pedalaman ini dialihkan fungsinya. Lahan yang semula berupa hutan dan tegalan dibuka secara masif untuk memfasilitasi kebun teh. Data kearsipan kolonial mencatat peningkatan jumlah tanaman yang sangat besar dalam hitungan beberapa tahun. Pada periode tahun 1831–1832, jumlah tanaman teh di Wanayasa telah mencapai 541.192 pohon.<sup>19</sup> Konversi lahan

---

<sup>17</sup> G. De Seriere, *Mijne Loopban In Indie* (Zwolle, 1849). Hal 23

<sup>18</sup> Her Suganda, *Kisah Para Preanger Planters* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2014). Hal. 4

<sup>19</sup> Guillaume de Serière, *Mijne Loopbaan in Indië*, National L (R. van Wijk, Anths Zoon, 1849). Hal. 131

persawahan tradisional milik penduduk lokal menjadi perkebunan teh monokultur tidak dapat dihindarkan. Proses konversi lahan berskala besar ini menyebabkan disrupsi ekologis pada sistem pengairan tradisional desa. Perubahan tata ruang ini juga memicu transformasi struktur kepemilikan tanah agraria di tingkat distrik.

Setelah peristiwa tahun 1832 tersebut, Pemerintah Hindia Belanda tetap melanjutkan proyek ekonomi perkebunan teh. Otoritas kolonial merespons kerusakan tersebut dengan meningkatkan pengawasan keamanan dan memperbanyak personel militer. Pemerintah juga mulai menerapkan modernisasi mekanisasi alat produksi pada fasilitas pengolahan hasil panen teh. Pabrik-pabrik pengolahan teh berskala besar mulai didirikan secara resmi di beberapa lokasi strategis distrik.<sup>20</sup> Fasilitas industri pengolahan tersebut dibangun antara lain di kawasan Pasirmuncang, Sindangpanon, dan juga Sukadami.<sup>21</sup> Keberadaan fasilitas pengolahan ini menunjukkan perkembangan Wanayasa menjadi kawasan industri agro-terintegrasi yang modern. Otoritas perkebunan berhasil mengkonsolidasikan seluruh tahapan produksi teh dalam satu manajemen pengawasan birokrasi. Rantai produksi tersebut meliputi proses penanaman, pemetikan daun, hingga tahap pengemasan teh untuk pengiriman ekspor.<sup>22</sup>

Pemindahan pusat administrasi pada tahun 1821 sebenarnya menjadi faktor penting yang memperlancar pelaksanaan konversi lahan. Kebijakan politik bupati terbukti memberikan kemudahan bagi masuknya investasi tanaman teh pada tahun berikutnya. Sampai saat ini belum ada penelitian kualitatif yang mengkaji interaksi kedua aspek tersebut secara mendalam. Interaksi antara keputusan politik-spasial bupati pribumi dengan penetrasi modal agraria kolonial perlu dianalisis lebih lanjut. Kajian kritis mengenai fenomena transisi sektoral ini sangat dibutuhkan untuk melengkapi sejarah lokal di tingkat distrik. Penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah tersebut dengan menawarkan perspektif sejarah yang baru. Peneliti menerapkan pendekatan sejarah lokal yang integratif untuk menganalisis seluruh fenomena yang terjadi di Wanayasa. Analisis kritis dilakukan terhadap berbagai

---

<sup>20</sup> Guillaume de Serière.

<sup>21</sup> "Sejarah Teh Di Wanayasa Purwakarta."

<sup>22</sup> Guillaume de Serière, *Mijne Loopbaan in Indië*. Hal.142

dokumen tertulis yang menjadi sumber primer peninggalan birokrasi kolonial seperti catatan G. de Seriere pada buku *Mijne Loopbaan In Indie*, Vol 1 tahun 1849.

Untuk menjaga fokus dan kedalaman kajian, penelitian ini menetapkan batasan spasial yang ketat. Fokus penelitian ini dibatasi secara spesifik hanya pada wilayah administratif Distrik Wanayasa masa kolonial. Wilayah distrik ini dipilih karena memiliki keunikan historis dan karakteristik ekologis yang sangat khas. Fokus tersebut menjadi tempat pertemuan antara kebijakan politik pemerintahan tradisional dengan kepentingan ekonomi kolonial Hindia Belanda. Distrik ini juga memuat situs sejarah berupa bekas perkebunan teh pertama yang dibangun di karesidenan. Analisis mendalam terhadap distrik ini diharapkan dapat memberikan gambaran sejarah pada tingkat mikro secara jelas. Gambaran mikro dari distrik ini dapat merepresentasikan dinamika makro transisi agraria yang terjadi di Jawa. Pembatasan wilayah ini mempermudah peneliti melakukan pelacakan sumber sejarah lokal secara lebih saksama dan detail.

Sementara itu, batasan waktu dalam penelitian ini ditetapkan dari tahun 1821 sebagai titik awal analisis karena alasan historis. Momentum tahun tersebut menandai kebijakan penting pemindahan ibu kota Kabupaten Krawang menuju wilayah pedalaman Wanayasa. Peristiwa politik ini menjadi awal dari proses integrasi administratif wilayah pegunungan ke dalam sistem kolonial. Pemindahan ibu kota terbukti membuka akses geografi bagi pelaksanaan eksploitasi ekonomi sektor perkebunan teh. Kebijakan bupati pribumi pada tahun ini secara tidak langsung menentukan arah perkembangan ekonomi wilayah selanjutnya. Rentang waktu dimulai dari tahun ini untuk melihat kondisi awal masyarakat sebelum perkebunan diterapkan. Sedangkan batasan penelitian sejarah ini dibatasi hingga tahun 1870 sebagai batas periodisasi yang logis karena Pemerintah Kolonial Hindia Belanda secara resmi mengesahkan pemberlakuan undang-undang baru bernama *Agrarische Wet*.<sup>23</sup> Regulasi hukum ini secara resmi mengakhiri sistem monopoli ekonomi negara yang dijalankan melalui Tanam Paksa. Undang-undang ini juga mengizinkan masuknya investor swasta asing untuk menyewa tanah dan membuka

---

<sup>23</sup> Sudrajat Masyrullahushomad, "Penerapan Agrarische Wet ( Undang-Undang Agraria ) 1870 : Periode Awal" 7, no. 2 (2019).

kebun. Perubahan regulasi makro tersebut secara otomatis mengubah sistem pengelolaan industri perkebunan teh di wilayah Wanayasa. Sistem pengelolaan perkebunan berubah dari model tanam paksa pemerintah menjadi sistem kapitalisme perkebunan swasta. Oleh karena itu, tahun 1870 menjadi batas akhir yang tepat untuk menutup analisis fase transisi.

## **B. Rumusan Masalah**

Pada penelitian ini berpusat pada kondisi transformasi ekonomi di Wanayasa selama abad ke-19, di mana integrasi wilayah ke dalam pasar global melalui komoditas kopi dan teh tidak serta-merta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi secara merata. Meskipun Wanayasa menjadi salah satu lumbung ekspor penting di Priangan, proses peralihan dari ekonomi subsisten ke sistem perkebunan komersial menciptakan tekanan struktural yang mendalam pada pola kepemilikan tanah dan relasi sosial. Terdapat ketidakjelasan mengenai bagaimana masyarakat lokal menegosiasikan kepentingan mereka di tengah impitan kebijakan kolonial yang eksploitatif, sehingga memicu pertanyaan besar mengenai mekanisme adaptasi dan resiliensi ekonomi yang sebenarnya terjadi di level akar rumput.<sup>24</sup>

Kesenjangan dalam literatur sejarah sejauh ini menunjukkan adanya kecenderungan generalisasi yang menyamakan dampak kebijakan ekonomi kolonial di seluruh wilayah Jawa tanpa mempertimbangkan keunikan ekologis dan sosial Wanayasa. Kebanyakan studi terdahulu lebih berfokus pada statistik produksi makro dan mengabaikan dinamika mikro mengenai bagaimana transisi dari komoditas kopi ke teh memengaruhi struktur pendapatan dan stratifikasi sosial masyarakat pegunungan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menutup celah tersebut dengan menelusuri secara spesifik proses perubahan struktur ekonomi di Wanayasa yang selama ini belum mendapatkan porsi pembahasan mendalam dalam historiografi ekonomi Indonesia.

---

<sup>24</sup> Mumuh Muhsin Zakaria, "Dinamika Sosial Ekonomi Priangan Abad Ke-19," *Sosiohumaniora* 13, no. 1 (2011): 96–107, <https://doi.org/10.24198/SOSIOHUMANIORA.V13I1.5464>.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dirumuskan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi dan struktur ekonomi masyarakat Wanayasa sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan Sistem Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) pada tahun 1830?
2. Bagaimana dampak sosial-ekonomi dari peralihan orientasi komoditas pertanian di Wanayasa terhadap kesejahteraan hidup masyarakat lokal selama periode 1821–1870?

Rumusan masalah ini dirancang untuk memberikan arah yang tegas bagi jalannya penelitian agar tetap terfokus pada analisis perubahan struktural dan dampak kemanusiaan dari sebuah kebijakan ekonomi. Dengan menjawab kedua pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rekonstruksi sejarah ekonomi yang komprehensif sekaligus memberikan wawasan baru mengenai peran aktif aktor lokal dalam sejarah global. Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu sejarah ekonomi dan menjadi bahan refleksi dalam merancang strategi pengembangan ekonomi berbasis komoditas lokal di masa depan.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk merekonstruksi secara komprehensif proses transisi ekonomi masyarakat Wanayasa di tengah arus kebijakan kolonial yang eksploitatif. Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi tahapan-tahapan krusial dalam perubahan mata pencaharian penduduk dari sektor pertanian subsisten menuju keterlibatan aktif dalam perkebunan komoditas ekspor. Dengan memahami proses ini, peneliti berupaya memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana kebijakan negara mampu mengubah orientasi ekonomi sebuah wilayah pegunungan secara fundamental.

Fokus utama penelitian ini menjadi pijakan dasar untuk melihat keterkaitan antara regulasi kebijakan kolonial dengan pelaksanaannya di tingkat distrik Wanayasa. Maka dari itu, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kondisi dan struktur ekonomi masyarakat Wanayasa sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan Sistem Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) pada tahun 1830.
2. Untuk menguraikan dampak sosial-ekonomi dari peralihan orientasi komoditas pertanian di Wanayasa terhadap kesejahteraan hidup masyarakat lokal selama periode 1821–1870.

Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk menyediakan basis data sejarah yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam mengelola potensi ekonomi lokal saat ini. Dengan memahami sejarah kejayaan dan kejatuhan komoditas teh serta kopi di masa lalu, para pengambil kebijakan dapat merancang strategi pengembangan agribisnis yang lebih berkelanjutan. Tujuan praktis ini juga mencakup penyediaan materi edukatif bagi masyarakat Wanayasa agar memiliki kesadaran sejarah mengenai identitas ekonomi wilayahnya. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya berhenti di rak perpustakaan, tetapi juga memberikan solusi inspiratif bagi tantangan ekonomi pedesaan di masa kini.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian mengenai transformasi ekonomi masyarakat Wanayasa pada tahun 1821-1870 mencakup dimensi yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun aplikasi kebijakan di lapangan. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya literatur sejarah ekonomi lokal yang sering kali terabaikan dalam narasi sejarah nasional yang lebih makro. Hasil studi ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai dinamika masyarakat agraris di wilayah pegunungan saat berinteraksi dengan sistem kapitalisme global. Penelitian ini menawarkan sudut pandang baru dalam melihat proses dekolonisasi historiografi dengan menempatkan agensi petani lokal sebagai subjek utama dalam perubahan struktur ekonomi. Selain itu, temuan ini akan memperkuat landasan teoretis mengenai bagaimana sebuah wilayah pedalaman merespons fluktuasi komoditas internasional seperti kopi dan teh. Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini berfungsi sebagai referensi akademik bagi peneliti lain yang tertarik pada tema transisi ekonomi masyarakat pedesaan di Indonesia.

Kontribusi teoritis selanjutnya terletak pada pengembangan konsep resiliensi ekonomi dan adaptasi sosial di bawah tekanan kebijakan kolonial yang eksploitatif. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana konsep-konsep ekonomi politik dapat diterapkan secara spesifik pada level mikro untuk menjelaskan pergeseran relasi kuasa dan kepemilikan tanah. Dengan mengkaji transisi dari komoditas kopi ke teh, studi ini memberikan wawasan mengenai fleksibilitas struktur sosial masyarakat Jawa Barat dalam menghadapi tantangan ekologis dan pasar. Hal ini bermanfaat untuk menyempurnakan teori-teori mengenai perubahan sosial pedesaan yang sering kali dianggap statis oleh para peneliti terdahulu. Analisis ini juga memperlihatkan bahwa integrasi ekonomi tidak selalu berjalan searah, melainkan melalui proses negosiasi yang kompleks antara otoritas dan penduduk lokal. Oleh karena itu, penelitian ini secara teoritis mampu menjembatani celah pengetahuan antara sejarah perkebunan dengan sosiologi masyarakat agraris.

Secara praktis, temuan dari penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga bagi para pembuat kebijakan dalam merancang program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal di wilayah pedesaan. Sejarah transformasi ekonomi di Wanayasa menjadi cermin bagi pemerintah daerah untuk memahami karakteristik ekonomi wilayahnya yang memiliki akar historis yang kuat pada sektor perkebunan. Dengan mempelajari kegagalan dan keberhasilan masa lalu, praktisi pembangunan dapat merumuskan strategi diversifikasi komoditas yang lebih tahan terhadap guncangan pasar global. Temuan ini juga membantu mengidentifikasi pola hubungan antara petani dan pemilik modal yang secara struktural mungkin masih menetap hingga masa kini. Melalui data sejarah yang akurat, kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat diarahkan agar tidak mengulang kesalahan struktural yang terjadi di masa kolonial. Pengetahuan sejarah ini pada akhirnya menjadi alat praktis untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan yang lebih inklusif.

Selain bagi pemerintah, manfaat praktis penelitian ini sangat relevan bagi pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya dan sejarah di wilayah Wanayasa. Temuan mengenai lokasi perkebunan kopi dan teh bersejarah dapat dikonversi menjadi narasi agrowisata yang memiliki nilai edukatif tinggi bagi wisatawan

maupun masyarakat lokal. Praktisi di bidang pariwisata dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk menyusun materi interpretasi yang autentik mengenai warisan budaya perkebunan di Jawa Barat. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya tarik wilayah, tetapi juga memberikan peluang ekonomi baru bagi penduduk melalui pelestarian situs-situs bersejarah. Kesadaran akan identitas ekonomi masa lalu akan menumbuhkan kebanggaan kolektif yang mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam pelestarian aset budaya. Dengan demikian, sejarah tidak lagi dianggap sebagai masa lalu yang mati, melainkan aset produktif untuk kesejahteraan masa kini.

Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis bagi lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat dalam memperkuat literasi sejarah lokal bagi generasi muda. Temuan riset ini dapat diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran sejarah di tingkat sekolah menengah maupun perguruan tinggi sebagai studi kasus lokal yang nyata. Para praktisi pendidikan dapat menggunakan narasi transformasi ekonomi Wanayasa untuk mengajarkan konsep-konsep ekonomi dan sejarah secara lebih kontekstual dan menarik. Hal ini penting untuk membekali generasi penerus dengan pemahaman yang kritis mengenai asal-usul struktur sosial dan ekonomi di tempat mereka tinggal. Selain itu, komunitas lokal dapat menggunakan informasi ini sebagai bahan advokasi dalam isu-isu yang berkaitan dengan hak atas lahan dan sumber daya alam. Dengan pemahaman sejarah yang kuat, masyarakat akan memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam menghadapi dinamika pembangunan modern.

Secara keseluruhan, integrasi manfaat teoritis dan praktis ini memastikan bahwa penelitian ini memiliki dampak berkelanjutan yang melampaui batas ruang kelas akademik. Secara teoretis, studi ini menutup celah dalam historiografi ekonomi, sementara secara praktis ia menawarkan solusi bagi tantangan pembangunan kontemporer di tingkat lokal. Keberlanjutan ekonomi masyarakat Wanayasa di masa depan dapat dibangun di atas pemahaman yang jernih mengenai perjalanan panjang transformasi mereka sejak abad ke-19. Penelitian ini membuktikan bahwa penggalian terhadap arsip dan data sejarah mampu memberikan kontribusi nyata bagi pemecahan masalah sosial-ekonomi di lapangan.

Harapannya, hasil kerja ini akan menjadi jembatan bagi sinergi antara akademisi, praktisi, dan masyarakat dalam memajukan kesejahteraan berbasis kearifan sejarah. Dengan demikian, penelitian tesis ini mencapai tujuannya untuk menjadi karya yang bermakna secara intelektual maupun sosial bagi khalayak luas.

#### **E. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai kondisi Priangan pada abad ke 19 telah menghasilkan sejumlah temuan penting, meskipun masih menyisakan celah untuk studi kasus spesifik seperti Wanayasa. Studi-studi awal, seperti karya Jan Breman (2014) tentang *Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi* dan analisis Teguh (2019) tentang *Preangerstelsel*, memberikan kerangka kritis mengenai bagaimana sistem kerja paksa kopi (1723-1892) di Priangan menjadi sumber eksploitasi dan keuntungan kolonial, yang secara fundamental mengubah struktur ekonomi lokal. Kontrasnya, Mumuh Muhsin Zakaria (2018) menemukan bahwa sistem tersebut juga berkontribusi pada peningkatan daya ekonomi dan relatif kesejahteraan rakyat Priangan, ditandai dengan migrasi masuk. Fokus penelitian kemudian meluas pada aktor dan dampaknya.

Nina H. Lubis (2000) menyoroti peran penting Kaum Menak Priangan sebagai elite perantara yang status sosialnya diperkuat oleh birokrasi kolonial dalam melaksanakan sistem tanam paksa. Selanjutnya, M. Iskandar (2010), meskipun berfokus pada awal abad ke-20, memberikan konteks penting tentang agensi lokal dari kalangan ulama/kyai dalam menghadapi modernitas kolonial. Dalam konteks perkembangan komoditas lain, Fazri (2021) mengkaji peran pengusaha swasta (*Preanger Planters*) pasca-1870, yang memicu perkembangan infrastruktur dan urbanisasi di beberapa kota di Priangan, sementara Firmansyah (2017) menganalisis dampak modernisasi kolonial (perkebunan dan migrasi) terhadap perubahan sosial-ekonomi di Sukabumi. Secara umum, Nurcahyanti (2023) dalam kajian literatur menyimpulkan bahwa kolonialisme menciptakan ketimpangan struktural dan kelas sosial baru di Indonesia.

Studi-studi ini, termasuk analisis teknis oleh Tim Peneliti (2017) tentang produksi kopi dan karya R. T. P. Sulaeman (1983) tentang sejarah tiga kota lama,

secara kolektif mengonfirmasi bahwa Priangan abad ke-19 mengalami perubahan fundamental akibat kebijakan komoditas kolonial. Meskipun kaya akan informasi tentang dinamika Priangan secara umum, penelitian terdahulu memiliki dua kesenjangan utama yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini. Pertama, terdapat kecenderungan generalisasi wilayah Priangan; studi kasus mendalam tentang wilayah penyangga atau pinggiran dengan dinamika perdagangan yang unik, seperti Wanayasa, masih minim. Wanayasa mungkin memiliki pola integrasi yang berbeda dari pusat kopi utama atau kota besar. Kedua, sebagian besar fokus tertuju pada kekuatan kolonial dan *Menak* (elite birokrat), sehingga kurang mendetail dalam menganalisis agensi lokal atau respon aktif (adaptasi, negosiasi, resistensi) dari masyarakat akar rumput di Wanayasa. Dampak mikro dan multidimensi, seperti perubahan peran gender dan gaya hidup sehari-hari, juga sering terabaikan demi analisis ekonomi makro.

Oleh karena itu, perbedaan dengan penelitian terdahulu yang cenderung melakukan generalisasi makro terhadap wilayah Priangan (seperti studi Jan Breman dan Teguh mengenai eksploitasi *Preangerstelsel*, serta Mumuh Muhsin Zakaria tentang dampak kesejahteraannya) serta berfokus pada peran elite kolonial dan Menak (seperti dalam karya Nina H. Lubis), penelitian ini mengambil lokus spesifik di wilayah pinggiran, yaitu Wanayasa pada periode 1821-1870. Jika literatur sebelumnya lebih banyak menyoroti aktor-aktor atas atau dampak pasca-1870 (seperti kajian Fazri mengenai *Preanger Planters* dan Firmansyah tentang Sukabumi), penelitian ini secara khusus mengisi celah tersebut dengan menawarkan analisis mikro-historis yang mendalam.

Fokus utama pada penelitian ini akan secara spesifik berfokus kepada perubahan kondisi masyarakat Wanayasa, dan yang lebih penting, bagaimana masyarakat Wanayasa bertindak sebagai aktor aktif dalam menghadapi perubahan, bukan sekadar penerima dampak. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi dan memperkaya literatur sejarah Priangan dengan menyediakan gambaran yang lebih utuh dan berlapis mengenai transformasi sosial-ekonomi pada abad ke-19.

Berdasarkan hal tersebut, penjelasan mengenai perbedaan dan persamaan penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

<b>Indikator perbandingan</b>	<b>Penelitian terdahulu</b>	<b>Penelitian Saat ini</b>	<b>Hubungan dan Kegunaan Penelitian</b>
Inti Pembahasan	Membahas perubahan cara hidup petani akibat aturan tanam kopi dan teh dari pemerintah Belanda.	Sama-sama membahas perubahan cara hidup petani akibat aturan tanam kopi dan teh dari pemerintah Belanda.	Menjadi contoh nyata di lapangan tentang bagaimana aturan Belanda mengubah cara hidup masyarakat pedesaan.
Dampak Aturan Belanda	Sebagian melihat aturan Belanda murni menyengsarakan rakyat, sebagian lagi melihat ada kemajuan ekonomi dan kedatangan penduduk baru.	Menunjukkan bahwa kemajuan jalan dan peredaran uang memang ada, tetapi harus dibayar dengan kelaparan dan kemiskinan buruh.	Menjelaskan secara adil bahwa kemajuan lahiriah dari penjajah selalu berjalan bersamaan dengan penderitaan rakyat.
Tempat Penelitian	Membahas wilayah Priangan secara luas atau kota-kota besar yang sudah maju seperti Sukabumi dan Bandung.	Membahas khusus wilayah Wanayasa, sebuah daerah perbatasan atau penyangga yang jauh dari pusat kota.	Melengkapi sejarah daerah yang selama ini terlupakan atau disamaratakan dengan kota-kota besar.
Orang yang Diperhatikan	Lebih banyak memperhatikan gerak-gerik pemerintah Belanda, pengusaha besar, dan golongan bangsawan/Menak.	Lebih banyak memperhatikan masyarakat biasa di Wanayasa dalam menghadapi perubahan hidup mereka.	Memperlihatkan bahwa rakyat kecil tidak hanya diam menerima nasib, tetapi ikut bergerak, menyesuaikan diri, dan bertahan hidup.
Batasan Tahun	Membahas abad ke-19 secara acak atau langsung melompat ke masa setelah tahun 1870.	Masa Perubahan Penting (1821–1870): Dibatasi sejak Wanayasa menjadi pusat pemerintahan daerah sampai lahirnya undang-undang agraria baru.	Mengamati masa paling genting sebelum tanah-tanah di Hindia Belanda bebas disewa oleh pengusaha asing.
Hasil Akhir Analisis	Lebih banyak menampilkan angka-angka hasil panen, jumlah setoran, dan pembagian kelas masyarakat secara umum.	Menampilkan perubahan cara hidup sehari-hari, nasib kaum perempuan, hingga hilangnya hak rakyat atas tanah mereka.	Membuat sejarah masa lalu terasa lebih nyata, manusiawi, dan mendalam karena menceritakan nasib asli rakyat jelata.

## F. Kerangka Berfikir

Dalam sejarah perkembangan peradaban manusia, aktivitas ekonomi pada mulanya tidak pernah berdiri sendiri atau terpisah dari kehidupan sehari-hari. Konsep *embedded economy* menjelaskan sebuah tatanan masyarakat di mana kegiatan produksi, distribusi, hingga konsumsi barang sepenuhnya melekat dan dikendalikan oleh jaringan sosial, hukum adat, keyakinan agama, dan kewajiban politik.<sup>25</sup> Di dalam sistem ini, pasar hanyalah sebuah ruang fisik atau alat bantu sekunder, bukan penggerak utama kehidupan. Keputusan seseorang untuk mengolah tanah atau membagikan hasil panen tidak didasarkan pada keinginan egois untuk memperkaya diri sendiri, melainkan diatur oleh norma-norma moral komunal yang menuntut adanya timbal balik (*reciprocity*) dan redistribusi demi kelangsungan hidup bersama.

Ketika ekonomi masih berada dalam status *embedded*, relasi antar manusia jauh lebih bernilai ketimbang akumulasi barang atau materi misalnya, seorang petani membantu tetangganya bukan karena mengharapkan upah uang, melainkan karena ada ikatan moral bahwa kelak ia pun akan dibantu saat mengalami kesulitan. Keuntungan finansial yang maksimal (*profit maximization*) bukanlah tujuan hidup yang dikejar, karena masyarakat mengutamakan stabilitas sosial, kehormatan, gotong royong dan pemenuhan kebutuhannya secara adil melalui hukum adat.

Sedangkan Fenomena *disembedded economy* menandai titik balik yang radikal dalam sejarah modern ketika aktivitas ekonomi memisahkan diri, bahkan berbalik menjajah institusi sosial dan moral masyarakat.<sup>26</sup> Kondisi ini lahir seiring dengan kemunculan kapitalisme pasar bebas yang mengatur dirinya sendiri (*self-regulating market*). Dalam sistem yang baru ini, pasar tidak lagi menjadi bagian kecil dari masyarakat, melainkan masyarakatlah yang dipaksa menjadi bagian dari pasar. Segala aturan tradisi, ikatan kekeluargaan, dan pertimbangan moral yang dulunya mengendalikan ekonomi kini dianggap sebagai hambatan efisiensi yang harus dihancurkan agar motif keuntungan materi murni dapat berjalan tanpa batas.

---

<sup>25</sup> John Vail, *Karl Polanyi and the Paradoxes of the Double Movement* (London and New York: Routledge, 2022).

<sup>26</sup> B. Herry-Priyono, "Karl Polanyi Menanam Ekonomi," *Respons* 15, no. 02 (2010): 137–217.

Akibat dari terlepasnya ekonomi ini, seluruh sendi kehidupan manusia harus beradaptasi dan tunduk pada hukum penawaran dan permintaan pasar. Nilai sebuah tindakan atau benda tidak lagi diukur dari kontribusi sosialnya, melainkan dari harga nominal yang tertera di pasar. Keadaan ini menciptakan situasi yang dingin dan transaksional, di mana hubungan antarmanusia berubah menjadi hubungan antar-komoditas. Ketika ekonomi menjadi *disembedded*, fungsi negara dan komunitas bergeser sekadar menjadi pelindung kelancaran investasi dan akumulasi kapital, sementara kesejahteraan sosial dan perlindungan alam sering kali diabaikan demi menjaga pertumbuhan ekonomi yang abstrak.

Berkaitan dengan hal tersebut, Komodifikasi Tanah yang pada hakikatnya adalah alam itu sendiri, sebuah lingkungan hidup yang diciptakan oleh Tuhan dan bukan diproduksi oleh industri untuk diperjualbelikan. Karl Polanyi mengategorikan tanah sebagai komoditas semu (*fictitious commodity*) karena memperlakukan tanah seperti barang dagangan biasa adalah sebuah ilusi yang berbahaya.<sup>27</sup> Proses komodifikasi tanah terjadi ketika fungsi ruang hidup ini dicabut secara paksa dari konteks sosial, budaya, dan ekologisnya. Tanah yang awalnya merupakan warisan komunal leluhur, tempat bernaung, dan sumber pangan mandiri bagi masyarakat, diubah status hukumnya menjadi properti privat yang memiliki nilai sewa, nilai jual, dan dapat diagunkan demi keuntungan bisnis belaka.

Dampak dari komodifikasi tanah sangat merusak tatanan kehidupan agraris tradisional. Ketika tanah menjadi barang komersial, kepemilikannya cenderung terkonsentrasi di tangan segelintir kapitalis atau korporasi besar melalui mekanisme pasar atau perampasan legal oleh negara. Para petani lokal yang selama bergenerasi hidup dari tanah tersebut tiba-tiba kehilangan akses utamanya untuk bertahan hidup. Alam tidak lagi dipandang sebagai ibu yang harus dijaga keseimbangannya, melainkan diperas habis-habisan sebagai faktor produksi yang dinilai dari seberapa banyak komoditas ekspor yang bisa dihasilkan dari setiap meternya, memicu kerusakan ekologis berkepanjangan.

---

<sup>27</sup> Vail, *Karl Polanyi and the Paradoxes of the Double Movement*.

Perlu di pahami bahwa Tenaga kerja manusia bukanlah sebuah barang mati yang diproduksi di pabrik, melainkan cerminan dari aktivitas hidup, energi, dan martabat manusia itu sendiri. Sama seperti tanah, tenaga kerja adalah komoditas semu yang tidak pernah dirancang untuk tunduk pada hukum pasar bebas. Komodifikasi tenaga kerja terjadi ketika manusia dipaksa untuk memisahkan kemampuan fisik dan pikirannya dari totalitas kehidupan sosial mereka demi dijual sebagai barang dagangan. Di bawah sistem ini, seorang individu tidak lagi dihargai berdasarkan perannya sebagai kepala keluarga, warga desa, atau manusia berdaulat, melainkan dinilai semata-mata sebagai unit produksi yang memiliki harga sewa bernama "upah".

Proses komodifikasi ini memaksa manusia masuk ke dalam situasi rentan di mana kelangsungan hidup mereka digantungkan pada fluktuasi pasar yang kejam. Jika permintaan pasar terhadap keahlian mereka menurun, mereka akan dicoret dari sistem tanpa memperdulikan nasib anak dan istri mereka di rumah. Waktu manusia yang dulunya diatur oleh ritme alam dan ritual kebudayaan kini dipatok oleh jam kerja pabrik atau perkebunan yang ketat.<sup>28</sup> Manusia mengalami alienasi atau pengasingan diri karena mereka kehilangan kendali atas hasil kerjanya dan dipaksa memandang sesama pekerja bukan sebagai saudara, melainkan sebagai pesaing dalam memperebutkan upah demi menyambung hidup.

Dengan adanya pandangan *embedded* dan *disembedded economy* berakibat melahirkan kondisi *double movement* atau gerakan ganda, dalam tesis utama Polanyi menjelaskan dinamika konflik dalam masyarakat pasar modern.<sup>29</sup> Gerakan ini terdiri dari dua dorongan yang saling bertolak belakang namun lahir dari rahim yang sama. Gerakan pertama adalah dorongan menuju liberalisasi pasar (*marketization*) yang disokong oleh para pemilik modal dan kebijakan pemerintah yang pro-pasar. Gerakan ini berupaya menyebarluaskan prinsip pasar bebas ke seluruh pelosok kehidupan, memperluas komodifikasi tanah dan tenaga kerja, serta menghapus segala bentuk proteksi sosial demi menciptakan pasar global yang tidak terbatas.

---

<sup>28</sup> B. Herry-Priyono, "Karl Polanyi Menanam Ekonomi."

<sup>29</sup> Vail, *Karl Polanyi and the Paradoxes of the Double Movement*.

Namun, karena komodifikasi yang ekstrem secara alamiah merusak kemanusiaan dan lingkungan, muncullah gerakan kedua, yaitu gerakan tandingan (*counter-movement*). Gerakan tandingan ini bukanlah sebuah konspirasi politik yang direncanakan, melainkan reaksi pertahanan diri yang spontan dari masyarakat untuk melindungi diri dari kehancuran sosial akibat keserakahan pasar bebas. Gerakan ini mewujud dalam bentuk tuntutan perlindungan upah layak, pembatasan jam kerja, lahirnya jaminan sosial, hingga regulasi pelestarian alam. Gerakan ganda menunjukkan bahwa pasar bebas yang tanpa kendali mustahil dapat bertahan lama karena masyarakat secara naluriah akan selalu menciptakan benteng pertahanan untuk menjinakkan keganasan pasar tersebut.

Berkenaan dengan pandangan tersebut, sebelum tahun 1830, kehidupan masyarakat di wilayah pegunungan Wanayasa berjalan dalam ekosistem ekonomi yang sangat melekat (*embedded*) pada adat istiadat Sunda dan moralitas agraris. Aktivitas ekonomi masyarakat diatur oleh kepatuhan kepada lembaga desa dan pemenuhan kebutuhan pangan keluarga melalui sawah subsisten. Saling berbagi tenaga melalui tradisi gotong royong dan sistem bagi hasil pertanian dipelihara untuk menjaga keharmonisan komunitas setempat. Pasar dalam konteks ini hanyalah tempat bertukarnya hasil bumi berlebih secara lokal, dan relasi sosial antara sesama penduduk atau dengan pemimpin tradisional (*pamong praja*) masih dilandasi oleh rasa saling menghormati dan ikatan paternalistik.

Memasuki abad 19, tatanan *embedded* ini dihancurkan secara sistematis oleh intensifikasi kebijakan *Preangerstelsel* dan *Cultuurstelsel* yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda.<sup>30</sup> Logika ekonomi Wanayasa mendadak dicabut dari akar sosialnya dan dipaksa beralih menjadi *disembedded economy*. Segala keputusan tentang apa yang harus ditanam, kapan harus memanen, dan berapa banyak hasil yang harus diserahkan kini ditentukan oleh fluktuasi harga kopi di bursa komoditas Amsterdam. Pemerintah kolonial memanfaatkan para bupati dan kepala desa sebagai kepanjangan tangan untuk menegakkan kepatuhan pasar,

---

<sup>30</sup> H Y Agus Murdiyastomo and Sabrina Nobelia Putri Anggastri, "Preangerstelsel: Sistem Tanam Paksa Kopi Priangan Tahun 1723 – 1892," *Journal of Social Sciences & Humanities* 3, no. 2 (2023): 445–59.

mengubah orientasi moral masyarakat Wanayasa menjadi mesin produksi ekspor yang dingin demi ambisi finansial Belanda di Eropa.

Kondisi tersebut tidak bisa di lepaskan dari dampaknya pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengalami defisit anggaran belanja yang signifikan setelah kebangkrutan VOC dan berakhirnya Perang Jawa pada tahun 1830.<sup>31</sup> Untuk mengatasi krisis finansial yang mendalam tersebut, pemerintah pusat di Batavia menerapkan restrukturisasi ekonomi yang radikal. Kebijakan baru ini sangat berorientasi pada eksploitasi sektor agraria di berbagai wilayah Pulau Jawa. Pemerintah kolonial melakukan pemaksaan budidaya komoditas ekspor yang laku di pasar Barat.<sup>32</sup> Kebijakan ekonomi tersebut bertujuan untuk memulihkan stabilitas fiskal pemerintah kolonial secara cepat. Selain itu, regulasi ini dirancang untuk mengintegrasikan wilayah pedalaman Jawa ke dalam jaringan pasar internasional.<sup>33</sup> Proses integrasi ekonomi dipaksakan melalui mobilisasi sumber daya alam dan manusia secara terpusat.

Transformasi ekonomi masyarakat Wanayasa pada tahun 1821-1870 merupakan sebuah potret mikro dari guncangan besar yang melanda tatanan agraris Nusantara akibat penetrasi kapitalisme kolonial. Mengacu pada pemikiran Karl Polanyi dalam *The Great Transformation*, fenomena ini dapat dijelaskan sebagai proses pelepasan ekonomi dari keterlekatan sosialnya yang semula bersifat komunal.<sup>34</sup> Di Wanayasa, sistem ekonomi yang awalnya berakar pada pemenuhan kebutuhan hidup bersama secara perlahan dipaksa untuk tunduk pada mekanisme pasar global yang digerakkan oleh otoritas pemerintah Hindia Belanda.

Konsep utama dalam penelitian ini adalah transisi dari ekonomi yang *terlekat* (*embedded*) menjadi ekonomi yang *terpisah* (*disembedded*) dari norma-norma adat.<sup>35</sup> Masyarakat Wanayasa, yang sebelumnya menjalankan praktik pertanian

---

<sup>31</sup> yus. Ginanti, N. ketut, Zain, siti suratini, & Tiani, "Tinjauan Historis Peran Perjuangan Pangeran Diponegoro Tentang Peristiwa Perang Jawa Pada Tahun 1825-1830" 1, no. 1 (2019): 31–43.

<sup>32</sup> Iswahyudi, "The Implementation of the Cultuurstelsel in Java : Cases in Afdeeling Demak and Grobogan , Central Java versus in Afdeeling Pacitan , East Java 1830-1870."

<sup>33</sup> Bosma, "Het Cultuurstelsel En Zijn Buitenlandse Ondernemers."

<sup>34</sup> B. Herry-Priyono, "Karl Polanyi Menanam Ekonomi."

<sup>35</sup> B. Herry-Priyono.140

berbasis gotong royong atau saling bantu, mulai didorong masuk ke dalam sistem kebijakan Tanam Paksa. Polanyi menekankan bahwa ketika tanah dan tenaga kerja diperlakukan sebagai komoditas, maka, akan mengakibatkan terjadinya keretakan dalam fondasi moral masyarakat yang selama ini menjadi pelindung bagi individu di dalamnya.

Transformasi ini tidak hanya terjadi di Wanayasa, tetapi juga menunjukkan pola serupa di wilayah lain seperti Cirebon yang mengalami komodifikasi lahan secara masif. Di Cirebon, industrialisasi gula pada abad ke-19 mengubah petak-petak sawah rakyat menjadi perkebunan tebu yang dikelola secara industri, di mana petani kehilangan hak otonom atas tanah mereka sendiri.<sup>36</sup> Proses ini mencerminkan apa yang disebut Polanyi sebagai penciptaan komoditas semu, di mana alam (tanah) dipaksa menjadi barang dagangan demi keuntungan korporasi kolonial. Contoh konkret di Cirebon menunjukkan bahwa penguasa lokal atau para sultan seringkali terjepit di antara kepentingan mempertahankan tradisi dan tuntutan untuk menjadi agen pengumpul pajak bagi Belanda.<sup>37</sup> Transformasi di wilayah ini memicu fragmentasi sosial yang tajam, di mana relasi antara petani dan pemilik tanah tidak lagi didasarkan pada ikatan feodal yang saling melindungi, melainkan pada hubungan kontrak yang eksploitatif. Hal ini menjadi bukti nyata bagaimana pasar merubah tatanan masyarakat yang telah bertahan selama berabad-abad di tanah Jawa.

Sementara itu, di Sukabumi, transformasi ekonomi terlihat jelas melalui pembukaan perkebunan swasta yang mengubah lanskap hutan menjadi ladang-ladang kopi dan teh. Wilayah Sukabumi menjadi laboratorium bagi kapitalisme perkebunan yang memobilisasi tenaga kerja dari berbagai daerah untuk bekerja sebagai buruh upahan.<sup>38</sup> Sebagaimana dijelaskan Polanyi, tenaga kerja manusia yang semula memiliki identitas sosial utuh di desa asal mereka, kini direduksi menjadi sekadar unit produksi yang bisa dipertukarkan dengan upah murah. Kaitan

---

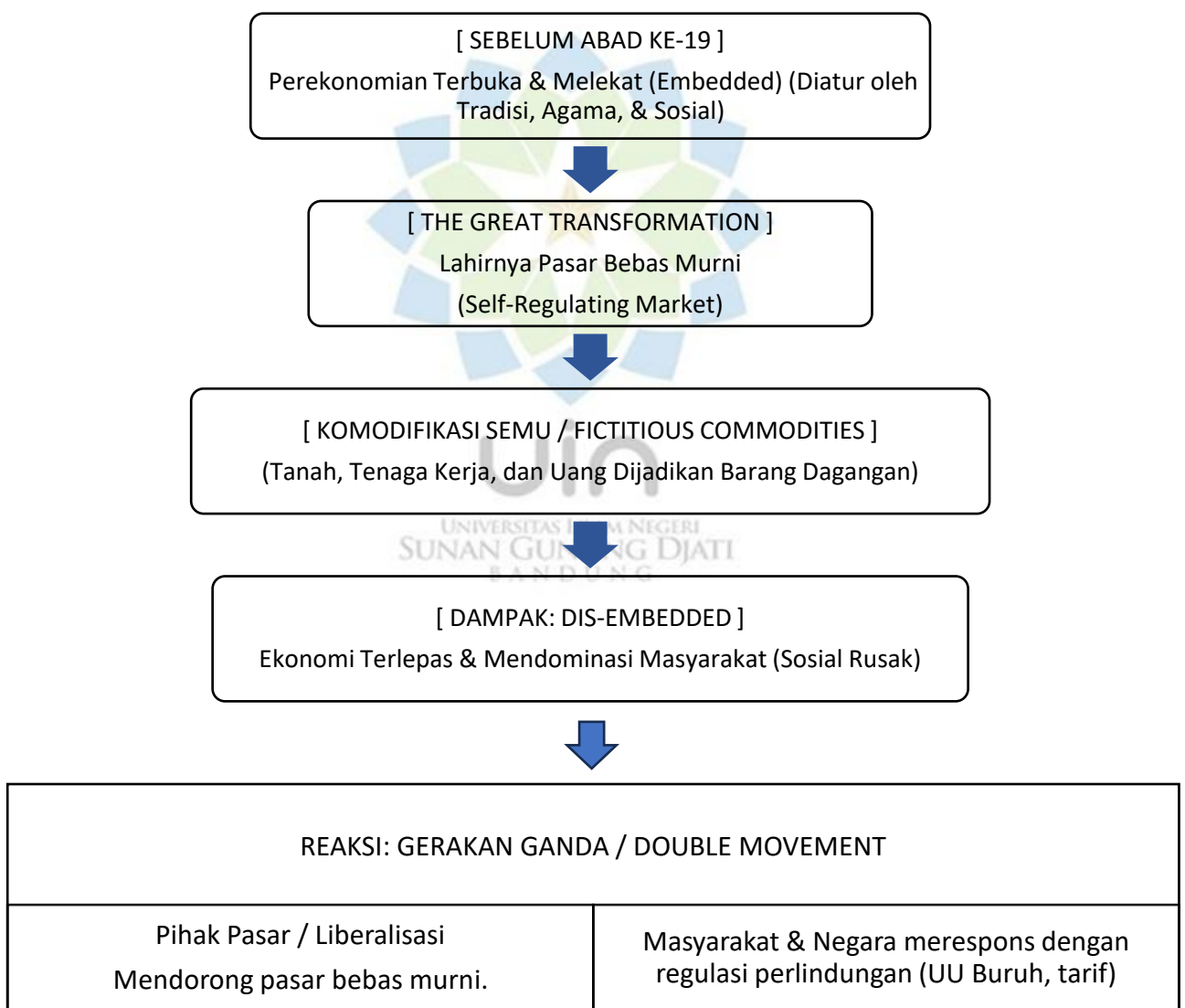
<sup>36</sup> Wisnuwardana, "Monetasi Dan Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Abad Xix I."

<sup>37</sup> Wisnuwardana.

<sup>38</sup> Dimas Aldi Pangestu and Zulkarnain, "Modernisasi: Sukabumi Dalam Arus Perubahan Sosial Ekonomi Era Kolonial Belanda," *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah* 16, no. 2 (2020): 1-12.

antara fenomena di Sukabumi dengan teori Polanyi terletak pada munculnya gerakan ganda (*double movement*) sebagai reaksi atas ekspansi pasar. Masyarakat di pedalaman Sukabumi merespons tekanan ekonomi ini dengan memperkuat praktik-praktik ekonomi informal atau melakukan perlawanan pasif guna melindungi ruang hidup mereka. Ketegangan antara dorongan modernisasi ekonomi oleh penguasa perkebunan dengan upaya masyarakat untuk mempertahankan subsistensi menjadi ciri khas sejarah ekonomi wilayah ini.<sup>39</sup>

Berikut merupakan konsep The Great Transformation dari Karl Polanyi.



<sup>39</sup> Pangestu and Zulkarnain.180

## G. Metode Penelitian

Metode merupakan sebuah cara kerja atau sebuah sistem untuk mencapai hasil dari sebuah penelitian. Fungsi metode adalah untuk mempermudah pelaksanaan sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian sejarah. Pendekatan ini juga akan memudahkan dalam menganalisis proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau, lalu dituliskan hasilnya berdasarkan fakta yang telah diperoleh.

Penelitian mengenai *Transformasi Ekonomi Masyarakat Wanayasa Pada tahun 1821-1870* ini menggunakan jenis penelitian sejarah (historis) dengan menerapkan pendekatan sejarah ekonomi. Alasan pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu secara akurat melalui sumber-sumber yang tersedia, mengingat transformasi ekonomi di wilayah Wanayasa pada periode tersebut sangat dipengaruhi oleh intervensi pemerintah kolonial yang kompleks dan tidak bisa dijelaskan hanya dari satu sudut pandang saja.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian sejarah yang terdiri dari *heuristik* untuk mengumpulkan sumber primer seperti arsip kolonial dan laporan statistik ekonomi, serta *verifikasi* atau *kritik* sumber untuk memastikan keabsahan data. Selanjutnya, dilakukan tahap *interpretasi* melalui analisis dan sintesis fakta untuk merangkai narasi yang logis, yang diakhiri dengan *historiografi* atau penulisan hasil penelitian.<sup>40</sup> Penerapan metode dan pendekatan ini sangat membantu dalam mencapai tujuan penelitian untuk mengungkap titik balik perubahan ekonomi kerakyatan, sekaligus berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan melalui pengayaan historiografi lokal.

### 1. Heuristik

Proses penelitian sejarah diawali dengan identifikasi sistematis terhadap jejak-jejak masa lalu yang tersebar dalam pelbagai bentuk artefak, dokumen, dan tradisi lisan. Tahap ini, dikenal sebagai heuristik, melibatkan pengumpulan

---

<sup>40</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013). Hal. 69

sumber primer seperti Arsip, babad atau kesaksian langsung pelaku sejarah,<sup>41</sup> serta sumber sekunder berupa interpretasi akademis yang telah melalui proses analitis.<sup>42</sup> Selain itu, sumber primer juga harus sezaman dengan peristiwa tersebut.<sup>43</sup> Kategorisasi hierarkis antara sumber primer dan sekunder berfungsi sebagai kerangka untuk membedakan antara *voice of the past* (narasi langsung dari aktor sejarah) dan *voice about the past* (rekonstruksi posterior oleh sejarawan). Tantangan utama terletak pada verifikasi autentisitas melalui analisis fisik sumber (*kritik ekstern*) dan pembacaan kritis terhadap bias intrinsik (*kritik intern*),<sup>44</sup> sebuah pendekatan yang menolak reduksi sejarah menjadi kronologi naif tanpa kedalaman kontekstual.

Pada proses pengumpulan sumber dilakukan dengan mengumpulkan sumber data berupa: Arsip kolonial (laporan perdagangan, catatan pertanian, arsip tanam paksa), Dokumen pemerintah Hindia Belanda, Naskah lokal (babad, catatan masyarakat Wanayasa), Literatur akademik (jurnal sejarah terakreditasi, buku rujukan), Wawancara sejarah lisan (*oral history*) dengan keturunan keluarga pelaku perdagangan/perkebunan di Wanayasa

Berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan untuk penelitian ini telah berhasil dikumpulkan dari sejumlah lembaga dan pihak terkait, termasuk Dinas Kearsipan Kabupaten Purwakarta, Perpustakaan Daerah Purwakarta, Balai Kearsipan Daerah Jawa Barat, Perpustakaan Daerah Jawa Barat, Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional, serta narasumber lokal seperti tokoh budayawan Purwakarta, tokoh budayawan Wanayasa, dan keluarga Bapak M. Moekri. Upaya pengumpulan sumber ini bertujuan untuk memperoleh data yang valid dan otentik mengenai sejarah perdagangan kolonial serta dinamika sosial masyarakat di Wanayasa. Meski demikian, proses pengumpulan dokumen dan arsip masih belum dapat dilakukan secara maksimal karena keterbatasan

---

<sup>41</sup> Charles-Victor Langlois & Charles Seignobos, *Introduction to the Study of History* (London: Duckworth, 1898).hal. 89

<sup>42</sup> E.H. Carr, *What Is History?* (London: Penguin, 1961, 1961).hal. 16

<sup>43</sup> Louis Gottschalk, *Understanding History* (New York: Alfred A. Knopf, 1969).hal. 124-126

<sup>44</sup> John Arnold, *Sejarah: Sebuah Pengantar Singkat*, Penerjemah: Auliaul Fitrah Samsuddin, (Yogyakarta: Basabasi, 2021).hal.89

waktu penulis, sehingga beberapa sumber penting masih dalam tahap identifikasi dan akses.

Beberapa sumber primer yang telah diperoleh antara lain :

- 1) salinan naskah asli *Babad Wanayasa* dari Perpustakaan Daerah Purwakarta, serta buku *Babad Wanayasa* hasil penelitian tim ahli filologi yang dipimpin oleh Bapak Rahmat Sopian, Ph.D., dan Bapak Mamat Ruhimat, M.Hum. *Babad Wanayasa* merupakan manuskrip historiografi tradisional yang merekam asal-usul, silsilah penguasa, dan transformasi wilayah Wanayasa di kaki Gunung Burangrang dari sebuah kawasan hutan (*wana*) yang dibuka menjadi pemukiman mandiri (*yasa*). Teks ini secara eksplisit menguraikan legitimasi kekuasaan para pendirinya, seperti Dalem Aria Suradikara I, melalui jejaring silsilah yang terhubung dengan dinasti besar Kesultanan Mataram, Cirebon, dan Sumedang Larang.
- 2) *Mijne Loopbaan in Indië* (1849) adalah buku memoar berbahasa Belanda karya Guillaume de Serièrè yang berisi catatan autobiografis mengenai perjalanan kariernya sebagai pegawai sipil (*ambtenaar*) pemerintah kolonial Hindia Belanda pada pertengahan abad ke-19. Buku ini berfungsi sebagai sumber primer yang sangat berharga karena menyajikan pengamatan langsung dari tangan pertama mengenai birokrasi pemerintahan di tingkat lokal, relasi kekuasaan antara pejabat Belanda dan elite pribumi, kondisi sosial-budaya masyarakat, serta dampak nyata kebijakan ekonomi kolonial terhadap penduduk lokal pada masa itu.
- 3) *Priangan: De Preanger-Regentschappen onder het Nederlandsch Bestuur tot 1811* adalah mahakarya historiografi monumental setebal empat jilid karya sejarawan dan arsiparis Belanda, Dr. Frederik de Haan, yang diterbitkan antara tahun 1910–1912 oleh Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Meskipun periodisasi buku *Priangan* karya F. de Haan membatasi diri hingga tahun 1811, karya monumental ini memiliki hubungan krusial sebagai fondasi historiografis yang menyediakan *baseline data* mengenai akar sejarah pembentukan wilayah, silsilah elite Menak, dan genesa awal sistem wajib tanam kopi (*Preangerstelsel*) di Wanayasa. Data ensiklopedis sebelum

abad ke-19 ini sangat penting bagi penelitian Anda sebagai komparator dan pintu masuk analisis untuk melacak kesinambungan maupun perubahan radikal yang terjadi pada struktur agraria, relasi kuasa, dan respons agensi lokal masyarakat akar rumput Wanayasa ketika memasuki fase intensifikasi ekonomi kolonial pada periode 1821–1870.

Sumber-sumber ini sangat berharga karena menyediakan data historis langsung mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Wanayasa pada abad ke-19, termasuk catatan terkait perdagangan, migrasi, struktur sosial, dan interaksi dengan pihak kolonial. Selain itu, keberadaan dokumen dan literatur yang telah diverifikasi secara akademik memungkinkan penulis melakukan triangulasi data dan analisis mendalam, sehingga penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika perdagangan kolonial dan dampaknya terhadap masyarakat lokal di Wanayasa.

## 2. Kritik

Setelah tahap heuristik selesai, peneliti sejarah melanjutkan ke tahap verifikasi kritis untuk memastikan keabsahan epistemologis sumber-sumber yang telah dikumpulkan.<sup>45</sup> Tahap ini, yang dikenal sebagai kritik sejarah, bertujuan menilai apakah sumber tersebut benar-benar mencerminkan fakta historis yang konsisten atau justru merupakan konstruksi subjektif dari aktor sejarah. Proses ini sangat penting karena tidak semua dokumen atau artefak dapat langsung dianggap sah; perlu dilakukan analisis mendalam untuk memahami konteks, tujuan, dan latar belakang pembuatan sumber agar interpretasi sejarah yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat dan terhindar dari bias.

Kritik sejarah dilakukan melalui dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern menitikberatkan pada aspek fisik sumber, seperti keaslian material, metode penanggalan, dan asal-usul dokumen, untuk memastikan sumber tersebut autentik dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, kritik intern fokus pada isi dan makna

---

<sup>45</sup> Wasino dan Endah Sri Hartatik, *Metode Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018). Hal 71

sumber melalui pembacaan hermeneutis, termasuk mengidentifikasi bias, motif, serta konteks sosial-politik saat dokumen tersebut dibuat. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, peneliti mampu memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan akurat mengenai sumber, sehingga analisis sejarah yang dilakukan dapat menangkap realitas sosial, ekonomi, dan budaya secara komprehensif, termasuk dinamika masyarakat Wanayasa pada abad ke-19.

### 3. Interpretasi

Data sejarah yang telah tervalidasi melalui kritik intern dan ekstern tidak dapat mengungkap narasi perubahan secara otomatis tanpa proses interpretasi. Dalam mengkaji transformasi ekonomi di Wanayasa, tahap interpretasi menjadi fase yang krusial sekaligus berisiko karena kerentanan terhadap subjektivitas peneliti. Oleh karena itu, diperlukan ketajaman analisis untuk meminimalisir bias pribadi sembari tetap mempertahankan kreativitas dalam merekonstruksi peristiwa masa lalu. Pada penelitian ini, interpretasi dilakukan dengan menyusun hubungan kausal dan tematik yang berfokus pada benturan antara dua sistem ekonomi yang berbeda. Mengacu pada teori Dualisme Ekonomi dari J.H. Boeke, analisis diarahkan pada tiga hal, *Pertama* menafsirkan bagaimana kebijakan perdagangan kolonial yang berorientasi pasar (kapitalistik) bersinggungan dengan sistem ekonomi masyarakat Wanayasa yang masih bersifat tradisional. *Kedua* menganalisis cara masyarakat lokal beradaptasi di tengah keterbatasan modal dan teknologi, dan yang *Ketiga* menginterpretasikan mobilitas penduduk dan interaksi dagang sebagai dampak dari kebutuhan tenaga kerja dalam sistem ekonomi dualistik, yang kemudian mengubah struktur sosial dan budaya masyarakat setempat.

Melalui pendekatan interpretatif yang didukung oleh teori ekonomi kolonial Boeke, peneliti dapat membedah secara mendalam bagaimana interaksi sosial dan ekonomi di Wanayasa tidak hanya sekadar perubahan angka perdagangan, tetapi merupakan sebuah transformasi struktural yang kompleks akibat pertemuan dua dunia yang berbeda.

### 4. Historiografi

Tahap akhir dalam penelitian sejarah adalah penulisan sejarah, yang dalam istilah akademik dikenal sebagai historiografi. Pada tahap ini, peneliti menyusun dan mengolah sumber-sumber sejarah yang telah melalui proses verifikasi dan kritik sejarah menjadi sebuah narasi yang terstruktur dan koheren. Historiografi bukan sekadar menyalin informasi dari dokumen atau artefak, tetapi melibatkan proses analisis, interpretasi, dan sintesis agar fakta-fakta yang disajikan benar-benar mencerminkan pemahaman historis yang mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses ini juga menuntut kehati-hatian dalam menyeimbangkan berbagai sumber, memperhatikan potensi bias atau keterbatasan data, serta menempatkan setiap informasi dalam konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya pada masa yang diteliti.

Secara praktis, historiografi berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan hasil penelitian kepada pembaca sekaligus menegaskan kontribusi akademik penelitian terhadap pengembangan ilmu sejarah. Narasi yang dihasilkan melalui historiografi memungkinkan peneliti menyoroti pola, hubungan sebab-akibat, dan dinamika perubahan dalam masyarakat, serta menafsirkan makna peristiwa sejarah dalam kerangka teori yang diterapkan. Dalam konteks penelitian di Wanayasa, historiografi menjadi tahap penting untuk memaparkan bagaimana perdagangan kolonial membentuk struktur ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat pada abad ke-19, sekaligus menunjukkan bagaimana interaksi antara kekuasaan kolonial dan agensi lokal membentuk pengalaman historis masyarakat yang kompleks dan multidimensional.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. hal.80